

## ABSTRAK

Anak angkat tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, namun dapat dilakukan melalui wasiat wajibah. Pasal 209 KHI anak angkat mendapatkan harta warisan tetapi tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta orang tua angkatnya. Hal ini untuk melindungi ahli waris dari orang tua angkatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Kedudukan hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2) Pelaksanaan pembagian harta waris untuk anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Kudus. 3) Akibat hukum dari pelaksanaan pembagian harta waris untuk anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Kudus. Penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-normatif yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data menggunakan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian adalah: 1) Kedudukan hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, hanya memperoleh wasiat. Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. 2) Pelaksanaan pembagian harta karena waris untuk anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pengadilan Agama Kudus dalam pelaksanaan penyelesaian kasus (Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Kds) dahulu proses mediasi, pengumpulan alat bukti surat dan saksi, sidang, pemeriksaan ke tempat obyek sengketa di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari desa setempat. Didalam penyelesaian kasus di Pengadilan Agama Kudus sudah sesuai dengan KHI yaitu cucu yang dianggap anak angkat dari nenek tersebut dan dirawat dari kecil hingga dewasa, sudah mendapatkan bagian dari warisan tersebut sebanyak 1/3 (sepertiga) dari harta nenek tersebut, dan anak kandung dari nenek tersebut yang bukan lain ayah kandung dari tergugat mendapatkan 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta kekayaan nenek tersebut. 3) Akibat hukum dari pelaksanaan pembagian harta karena waris untuk anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pengadilan Agama Kudus adalah anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada akibat saling mewarisi. Namun dalam KHI, akibat hukum dari harta tersebut adalah munculnya wasiat wajibah.

**Kata Kunci: Pelepasan, Harta Waris, Anak Angkat**

## **ABSTRACT**

*Adopted children cannot inherit from their adoptive parents, but can be done through the will of a mandate. Article 209 KHI adopted child gets inheritance but not more than 1/3 (one third) the property of his adopted parents. This is to protect the heir from his adopted parents. The purpose of this study was to analyze: 1) The position of adopted children inheritance rights in the Compilation of Islamic Law (KHI). 2) The distribution of inheritance for adopted children based on the Compilation of Islamic Law in the Holy Religious Court. 3) The legal consequences of the implementation of the distribution of inheritance for adopted children based on the Compilation of Islamic Law in the Holy Religious Court. This research is a juridical-normative approach which is sourced from the collection of data obtained from primary data and secondary data, then analyzed with qualitative analysis methods. Data collection techniques with interviews and literature study, data analysis using qualitative analysis. The results of the study are: 1) The position of adopted children inheritance rights in the Compilation of Islamic Law (KHI) is that adopted children do not become heirs of their adoptive parents, only obtaining a will. The amount cannot be more than 1/3 of the inheritance of the adopted parents according to Article 209 paragraph (2) Compilation of Islamic Law. 2) The distribution of assets due to inheritance for adopted children based on the Compilation of Islamic Law (KHI) in the Holy Religious Court in the implementation of case resolution (Decision Number 0480 / Pdt.G / 2017 / PA.Kds) precedes the mediation process, the collection of evidence and letters and witnesses, hearing, examination of the object of dispute in Jati District, Kudus Regency, attended by the Plaintiff of the Convention, the Defendant of the Convention and the Defendant of the Convention, and witnessed by 2 (two) witnesses from the local village. In the resolution of the case in the Holy Religious Court in accordance with KHI namely grandchildren who are considered adopted children of the grandmother and cared for from childhood to adulthood, have received a portion of the inheritance as much as 1/3 (one third) of the grandmother's assets, and biological children of the grandmother that other than the biological father of the defendant received 2/3 (two thirds) part of the grandmother's assets. 3) The legal consequences of the implementation of the distribution of assets because the heirs to adopted children based on the Compilation of Islamic Law (KHI) in the Holy Religious Court are adopted children and their adoptive parents do not have the result of mutual inheritance. But in KHI, the legal effect of the assets is the emergence of the mandatory will.*

*Keywords: Disposal, Inheritance, Adopted Children*